

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

Inez Revaeldha Aprilivia

inezrevaeldha@gmail.com

Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The study aims to test the impact of the local own-source revenue and the general allocation fund toward the capital expenditure (the study on the regencies/the cities and the local government of East Java). The type of this study is quantitative. There are 117 samples from 29 regencies, 9 cities and the local government of East Java in 2017-2019. The objects of the study are the Statement of Budget Realization (LRA-APBD) which is collected from the Financial Control and Local Assets Enterprise (BPKAD) of East Java. The Study applies the multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution). The result were explained that the local own-source revenue gives positive impact to the capital expenditure of the regencies/the cities in East Java it produces 6,154 t-count, while the t-table are 1.980 with significant number 0,000 which means the t-count is greater than t-table and the significant number show under 0,05. Meanwhile, the general allocation fund does not impact the capital expenditure of the regencies/the cities in East Java, it produces 1,177 t-count, while the t-table are 1,980 with 0,242 significant number which means the t-count is smaller than the t-table and the significant number is more than 0,05.

Keyword: the local own-source revenue, the general allocation fund, the capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan yaitu terdapat 117 sampel dari 29 Kabupaten, 9 Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan periode tahun 2017 hingga tahun 2019. Objek penelitian yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA-APBD) yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Alat uji yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan pengujian menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menghasilkan nilai t-hitung sebesar 6,154 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,980 dengan angka signifikan 0,000 yang berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel dan angka signifikan menunjukkan dibawah angka 0,05. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menghasilkan nilai t-hitung sebesar 1,177 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,980 dengan angka signifikan 0,242 yang berarti t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan angka signifikan lebih dari 0,05.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal

PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tujuan Otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal, nyata, dinamis dan

bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintahan pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Halim, 2004).

Di Indonesia anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bisa disebut dengan APBD. Anggaran Daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana satu pihak menggambarkan perhitungan pengeluaran setinggi tingginya guna membiayai kegiatan kegiatan dan proyek proyek suatu daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran pengeluaran yang dimaksud. Pemerintah Daerah menambah aset tetap dalam APBD dengan cara mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal, alokasi belanja modal tersebut didasarkan atas kebutuhan suatu daerah.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda beda dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah daerah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN guna mendanai kebutuhan daerahnya dalam mewujudkan desentralisasi. Dengan adanya transfer dana dari pusat diharapkan Pemda mampu untuk mengalokasikan PAD yang didapatkan untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Amelia (2013) menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang digunakan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan cara meningkatkan investasi yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah dituntut mampu untuk mengoptimalkan pendapatan yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah yaitu dengan cara memberikan peningkatan proporsi pada Belanja Modal untuk pembangunan pada sektor publik yang ada di daerah.

Yovita dan Utomo (2011) menyatakan pendapatnya bahwa pemanfaatan anggaran belanja sebaiknya dialokasikan untuk hal hal yang bermanfaat, contohnya seperti untuk pembangunan. Pendapatan Pemerintah Daerah seharusnya dialokasikan untuk program program pelayanan pada publik, pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah susunan belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang tidak produktif.

Menurut Permana dan Raharjo (2013) berpendapat bahwa fakta yang terjadi dalam pemerintahan daerah saat ini adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan meningkatnya belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. Anggaran ini sebenarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik seperti sarana dan prasarana umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tetapi dikarenakan adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal menyimpang dan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

Menurut Wandira (2013) dengan adanya beberapa pihak yang memperhatikan mengenai jumlah belanja pegawai yang dinilai cukup besar dalam APBD maka dengan adanya hal itu banyak pihak yang keberatan dengan berkurangnya alokasi belanja modal yang dipandang dapat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah dapat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah dengan cara

meningkatkan belanja modal, sumber sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini perlu dirumuskan permasalahan agar pembahasan penelitian ini lebih jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur?, (2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur?. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (2) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORITIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang Undang pasal 64 ayat 2 No 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran daerah setinggi tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran pengeluaran. Menurut Undang Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang dianggap sebagai nilai tambah kekayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran.

Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) Anggaran merupakan pernyataan yang berhubungan dengan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode guna mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah adalah salah satu alat yang mempunyai peranan penting dalam proses peningkatan pelayanan publik dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber sumber kekayaan daerah. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang dianggap sebagai pengurang nilai kekayaan daerah. Belanja daerah dirinci berdasarkan organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Alokasi belanja yang sesuai memiliki peranan yang cukup penting dalam mencapai stabilitas ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah. Belanja merupakan suatu alat informasi yang digunakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan/atau yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 24 Tahun 2014 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU bagi daerah menyebabkan terjadi adanya transfer yang dapat dikatakan cukup signifikan dalam APBN yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Menurut Ardhani (2011) Pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat yang kemudian direalisasikan melalui belanja modal. Dalam Undang Undang telah dijelaskan bahwa alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang kecil. Dan juga sebaliknya, apabila suatu daerah yang potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar maka alokasi DAU yang diperoleh cukup besar (Mahsun *et al.*, 2007). Dengan adanya prinsip pembagian alokasi tersebut dapat diketahui bahwa fungsi DAU digunakan sebagai faktor pemerataan kebutuhan fiskal.

Belanja Modal

Menurut PP No 71 Tahun 2010 Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang uang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin. Hasil yang dimiliki dari Belanja Modal adalah aset tetap yang ada pada APBD dengan tujuan untuk pembelian aset guna memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Apabila aktivitas belanja modal terhadap setiap daerah tinggi, maka akan terjadi peningkatan perekonomian pada daerah tersebut. Peningkatan belanja daerah dapat membantu pembangunan daerah yang merata hingga sampai ke pelosok sehingga tidak ada desa yang tertinggal jauh dari wilayah perkotaan di suatu daerah. Tujuan adanya Belanja Modal adalah untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah seperti bangunan infrastruktur dan harta tetap lainnya. Untuk menambah aset tetap, Pemda mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahunnya diadakan pengadaan aset tetap oleh Pemda sesuai dengan prioritas anggaran dan juga pelayanan publik yang dapat memberikan dampak secara financial dalam jangka panjang (Ardhani, 2011).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah, dapat ditinjau bahwa semakin tinggi tingkat kreativitas dan kemandirian Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi suatu daerah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah, maka tingkat kemandirian yang diperoleh suatu daerah tersebut dapat diukur dengan cara melihat jumlah tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh disetiap daerah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian yang ada di daerah yang menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Modal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan dapat meningkatkan tingkat kontribusi terhadap pembangunan serta dapat meningkatkan aset tetap pada suatu daerah sehingga dengan adanya belanja modal diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat dikarenakan masyarakat telah memberikan sebagian uangnya yang berupa iuran kepada Pemerintah Daerah yang kemudian

menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

DAU bersumber dari dana transfer APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk anggaran daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dalam proses menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Pemberian dana ini bertujuan untuk meningkatkan alokasi belanja modal. Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, DAU diberikan guna membiayai pembangunan daerah. Dikarenakan sumber daya alam suatu daerah tidak sama dengan daerah lainnya, maka dari itu diberikan DAU agar tidak terjadi adanya ketimpangan fiskal antar daerah tersebut.

Apabila DAU yang diterima suatu daerah semakin tinggi, maka belanja modal yang dihasilkan juga semakin tinggi yang dianggarkan. DAU yang diterima oleh Pemerintah daerah diserahkan pada tiap daerah sesuai dengan kebutuhannya yang kemudian dialokasikan untuk belanja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, dalam upaya mendanai kebutuhan masyarakat daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan dana transfer kepada pemerintah daerah agar terjadi adanya kemampuan dalam pemerataan keuangan daerah. Dengan demikian terdapat hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dan Gambaran Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan Kausal Komparatif (*causal comparative research*). Penelitian Kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan karakteristik masalah yang berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, yang memiliki sifat pengujian hipotesis mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pendekatan kausal komparative (*causal comparative research*) merupakan salah satu jenis dalam penelitian kuantitatif.

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2010) merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang memiliki tujuan supaya data yang diperoleh bisa lebih representatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur yang mempunyai pendapatan daerah yang aktif dan dapat membiayai daerahnya sendiri dimana Pemerintah Daerah yang berada di Kabupaten/Kota Jawa Timur yang mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran APBD pada periode 2017 hingga 2019, data dari sampel tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Sampel

yang digunakan yaitu sebanyak 39 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Data Sekunder. Sumber data yang digunakan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran pada APBD periode 2017-2019, data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Periode dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2017 sampai dengan 2019, yaitu selama 3 (tiga) tahun periode yang berupa data jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini diidentifikasi sebagai variabel bebas dan variabel terikat. (1) Variabel bebas (variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel yang lain) yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, (2) Variabel terikat (variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel bebas) adalah Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Dalam penelitian ini PAD yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2017 hingga tahun 2019. Untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$PAD = Pajak\ Daerah + Retribusi\ Daerah + Hasil\ Pengelolaan\ Kekayaan\ Daerah\ yang\ dipisahkan + Lain\ Lain\ PAD\ yang\ sah.$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu pendapatan daerah yang termasuk dalam Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini DAU yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2017 hingga tahun 2019. Untuk menghitung Dana Alokasi Umum dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$DAU = Celah\ Fiskal + Alokasi\ Dasar\ Dimana,\ Celah\ Fiskal = Kebutuhan\ Fiskal - Kapasitas\ Fiskal$

Belanja Modal

Menurut PP No 71 Tahun 2010 Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang uang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin. Dalam penelitian ini Anggaran Belanja Modal yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur periode tahun 2017 hingga tahun 2019. Untuk menghitung Anggaran Belanja Modal dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah suatu metode yang berhubungan dengan penyajian dan pengumpulan kelompok data sehingga dapat memberikan informasi yang mudah untuk dipahami. Tujuan statistik deskriptif adalah untuk melihat profil data penelitian antar hubungan variabel yang digunakan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi normalitas. dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pendekatan grafik Probability Plot yang dilakukan dengan cara melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dan grafik. Dan juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorof Smirnov Test* dapat dilakukan dengan cara melihat angka secara detail dengan ketentuan data.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID). Dengan dasar analisis: (1) apabila ada pola seperti titik titik yang membentuk pola tertentu yang beraturan (bergelombang, menyebar ataupun menyempit), maka dapat dikatakan terjadi adanya heteroskedastisitas, (2) Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilihat pada tabel D-W (Durbin-Watson) dengan dasar analisis: (1) Angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif, (2) Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi, (3) Angka D-W di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam model regresi linier berganda. Dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) dengan ketentuan: (1) Jika nilai VIF < 10,00 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas, (2) Jika nilai VIF > 10,00 maka dapat dikatakan terjadi adanya multikolinieritas. Dan nilai *Tolerance* (TOL) dengan ketentuan: (1) Jika nilai TOL > 0,10, maka dapat dikatakan tidak terjadi adanya multikolinieritas, (2) Jika nilai TOL < 0,10, maka dapat dikatakan terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda adalah metode yang digunakan untuk mengetahui nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Untuk menguji hipotesis tersebut dapat menggunakan rumus: $BM_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 DU_{t-1} + e$.

Uji Kelayakan Model

Uji F digunakan untuk melihat signifikan model yang digunakan dalam penelitian. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Tingkat signifikan yang digunakan dalam menentukan F tabel yaitu sebesar 5%. Kriteria yang digunakan yaitu : (1) Apabila tingkat signifikan $> (\alpha) 0,05$ maka model regresi yang dihasilkan tidak layak untuk digunakan, (2) Apabila tingkat signifikan $< (\alpha) 0,05$ maka model regresi yang digunakan layak untuk digunakan.

Koefisien determinan (R^2) merupakan pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi pada variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen yang terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel independen akan memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen.

Uji Hipotesis

Uji T digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar analisis yang digunakan yaitu: (1) Jika signifikan uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak, (2) Jika signifikan uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima. Nilai t dapat ditentukan pada tingkat signifikan (α) 5%.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|----------|------------|----------------|
| PAD | 117 | 94.658 | 9327.125 | 643.57584 | 1367.015426 |
| DAU | 117 | 378.916 | 3998.432 | 1026.77626 | 557.140007 |
| BM | 117 | 114.678 | 3090.056 | 500.71726 | 553.355796 |
| Valid N (listwise) | 117 | | | | |

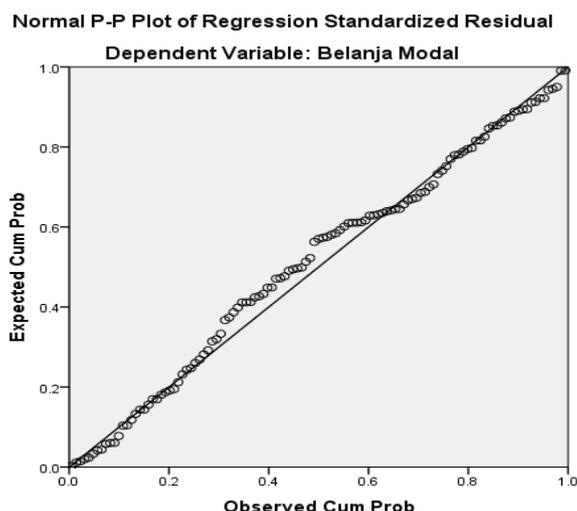
Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Dari hasil pengujian Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dalam penelitian ini adalah sebesar 117. Untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata rata dan standar deviasi dapat dilihat sebagai berikut: Pada Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil bahwa variabel PAD yang memiliki nilai minimum sebesar 94.658 sedangkan nilai maksimum sebesar 9327.125, PAD memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 643.57584, dan untuk standar deviasi sebesar 1367.015426. sedangkan pada Dana Alokasi Umum menunjukkan hasil bahwa variabel DAU yang memiliki nilai minimum sebesar 378.916, sedangkan DAU yang memiliki nilai maksimum sebesar 3998.432 diperoleh, DAU memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1026.77626, sedangkan untuk standar deviasinya sebesar 557.140007. Dan pada Belanja Modal menunjukkan hasil bahwa variabel BM yang memiliki nilai minimum sebesar 114.678, sedangkan nilai maksimum sebesar 3090.056, BM memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 500.71726, sedangkan untuk standar deviasinya sebesar 553.355796.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan *Kolmogorf-Smirnov Test* dan pendekatan grafik *Probability P*. Hasil grafik normal *Probability Plot* yang tertera pada Gambar 1 digunakan untuk melihat apakah hasil tersebut dapat dikatakan normal atau tidak normal.



Gambar 1
Grafik P-Plot

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil grafik normal Probability Plot, maka dapat dilihat bahwa data atau titik titik yang menyebar sesuai atau mendekati arah garis diagonal antara 0 (nol) dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat dikatakan normal dan telah memenuhi syarat uji normalitas.

Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 117 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 154.08387645 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .076 |
| | Positive | .035 |
| | Negative | -.076 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 2.059 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .092 ^c |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji *One-Simple Kolmogorof-Smirnov Test* pada Tabel 2, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikannya adalah 0,92 yang berarti lebih besar dari > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian hasil pengujian dengan pendekatan grafik *Probability Plot* dan pendekatan *One-Simple Kolmogorof-Smirnov Test* menunjukkan bahwa hasil data terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Apabila terjadi korelasi maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi, sedangkan regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi didalamnya. Berikut adalah tabel hasil dari Uji Autokorelasi dengan menggunakan uji statistik Durbin-Watson yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary^b | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .512 ^a | .262 | .249 | 155.429613 | .987 |

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 3, menunjukkan bahwa nilai dari angka Durbin-Watson (DW) sebesar 987 yang berarti angka tersebut berada diantara -2 dan +2 yang berarti terbebas dari autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak dapat terjadi suatu korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas. Jika tidak terjadi korelasi antara variabel bebas berarti model tersebut dikatakan baik. Berikut adalah tabel hasil dari uji multikolinearitas berdasarkan nilai TOL dan VIF:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

| Coefficients^a | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 351.903 | 41.886 | | 8.401 | .000 | | |
| PAD | .534 | .087 | .496 | 6.154 | .000 | .995 | 1.005 |
| DAU | .088 | .075 | .095 | 1.177 | .242 | .995 | 1.005 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

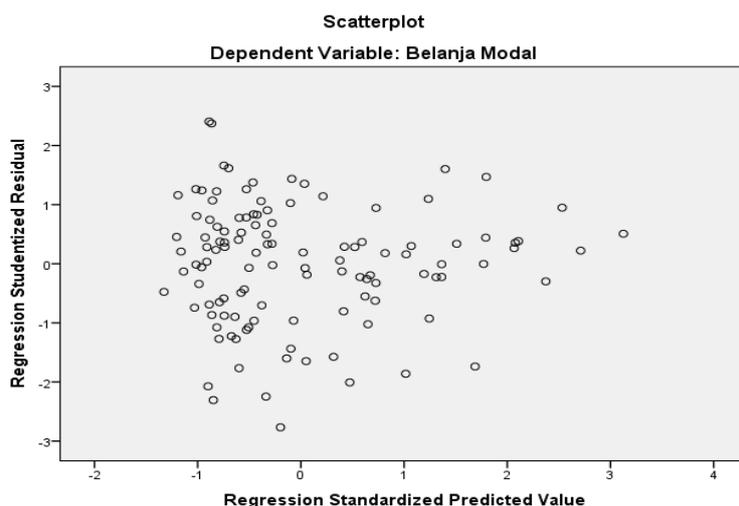
Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai TOL dari seluruh variabel tidak ada yang memiliki nilai TOL kurang dari 0,10 melainkan lebih besar dari 0,10 yaitu: Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai TOL sebesar 0,995 yang berarti lebih besar dari 0,10 dan pada Dana Alokasi Umum memiliki nilai TOL sebesar 0,995 yang berarti lebih besar dari 0,10. Sedangkan dalam perhitungan nilai dari VIF seluruh variabel kurang dari 10 yaitu: Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai VIF sebesar 1,005 yang berarti kurang dari 10 dan Dana Alokasi Umum memiliki nilai VIF sebesar 1,005 yang berarti kurang dari 10.

Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam regresi dan telah memenuhi kriteria yang terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji ini dapat dilakukan dengan homokedastisitas dengan cara melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit) dan juga data menyebar diatas dan dibawah angka

0 (nol), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil grafik uji heteroskedastisitas yang tertera pada Gambar 2.



Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat titik titik yg menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat pola tertentu yang teratur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya heterosledastisitas dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaruh hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut adalah hasil pengujian regresi linier berganda yang tertera pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| | | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 351.903 | 41.886 | | 8.401 | .000 |
| | PAD | .534 | .087 | .496 | 6.154 | .000 |
| | DAU | .088 | .075 | .095 | 1.177 | .242 |

a. Dependent Variable: BM
Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa nilai hasil dari perumusan sebagai perumusan dengan menggunakan tingkat signifikan dengan rumus sebagai berikut:

$$BM = 351.903 + 0,534 PAD + 0,088 DAU + e$$

Menunjukkan bahwa nilai koefisien pada variabel PAD sebesar 0,534. Dari nilai koefisien ini bersifat positif, maka dapat diartikan bahwa terdapat hubungan searah dengan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada nilai koefisien variabel DAU yaitu sebesar 0,088. Dari nilai koefisien ini bersifat positif, maka

dapat diartikan bahwa terdapat hubungan searah dengan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Uji Kelayakan Model

Uji F

Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Berikut merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS yang diperoleh nilai F dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA^a

| | Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|---|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 976515.482 | 2 | 488257.741 | 20.211 | .000 ^b |
| | Residual | 2754053.554 | 114 | 24158.365 | | |
| | Total | 3730569.036 | 116 | | | |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 20.211 sedangkan FTabel sebesar 3,07 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti nilai F memberikan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan apabila nilai *Adjusted-R²* semakin mendekati angka 1, maka akan memberikan pengaruh yang semakin kuat, sedangkan jika nilai *Adjusted-R²* mendekati angka 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dikatakan lemah. Berikut adalah Tabel 7 hasil perhitungan pada Koefisien Determinasi:

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .512 ^a | .262 | .249 | 155.429613 |

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0.262 atau sebesar 26,2%. Yang berarti variabel independen terhadap variabel dependen dapat dikatakan lemah. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang lemah terhadap Belanja Modal. Sedangkan sisanya sebesar 73,8% merupakan faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan tingkat signifikan $\leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS yang dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 351.903 | 41.886 | | 8.401 | .000 |
| | PAD (X_1) | .534 | .087 | .496 | 6.154 | .000 |
| | DAU (X_2) | .088 | .075 | .095 | 1.177 | .242 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil Uji t pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa dapat disimpulkan sebagai bahwa pengujian Hipotesis pada PAD (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar 6,154 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,980 dengan angka signifikan 0,000 yang berarti ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikarenakan angka signifikannya dibawah angka 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa H_1 diterima.

Sedangkan pada pengujian Hipotesis pada DAU (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1,177 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,980 dengan angka signifikan 0,242 yang berarti ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikarenakan angka signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa H_2 ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Uji t, hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 6,154 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,980 dengan angka signifikan 0,000 yang berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikarenakan angka signifikannya berada dibawah angka 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa H_1 diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi juga pengeluaran pemerintah atas belanja modal. Besarnya PAD menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan besarnya belanja modal, setiap penyusunan APBD pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal harus dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal maka pemda harus menggali PAD secara maksimal karena PAD berperan penting dalam pembangunan serta kemajuan untuk setiap daerah. Semakin besar PAD yang diterima, maka terdapat kemungkinan daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat.

Peningkatan dalam PAD dapat membantu untuk membiayai kebutuhan belanja modal yang juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan pada publik, dan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya kebutuhan daerah yang terpenuhi maka dapat memberikan dampak yang baik dalam mendorong perekonomian masyarakat agar kegiatan perekonomian juga bisa berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Dengan demikian dapat disimpulkan jika PAD suatu daerah mengalami peningkatan, maka kemampuan daerah tersebut untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami peningkatan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis pada Uji t, menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 1,177 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,980 dengan angka signifikan 0,242 yang berarti ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikarenakan angka signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa H_2 ditolak.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan adanya penelitian ini, dimana DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menerima DAU lebih tinggi cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal tersebut terjadi dikarenakan dana transfer berupa DAU yang disalurkan Pemerintah Pusat tidak semuanya digunakan untuk belanja modal, melainkan lebih banyak digunakan untuk membiayai biaya lainnya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.

Hairiyah *et al.*, (2017) menyatakan bahwa anggaran belanja modal yang digunakan tidak hanya berasal dari DAU saja, melainkan dapat diambil dari anggaran lainnya seperti Pendapatan Asli Daerah. Tidak semua Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima aliran dana transfer (DAU) dari pemerintah pusat dikarenakan DAU memiliki tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksudkan guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Suatu daerah yang memiliki potensi fiskalnya tinggi, maka DAU yang diperoleh daerah yang dimaksud rendah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya PAD yang diperoleh maka pengalokasian pembiayaan yang berupa belanja modal juga mengalami peningkatan dikarenakan terjadi hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan PAD dapat mempengaruhi pembangunan, perkembangan dan pelayanan publik pada daerah dengan tujuan menjadikan suatu daerah menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat sehingga hal tersebut dapat meningkatkan belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DAU yang diperoleh, maka proporsi alokasi Belanja Modal yang digunakan tidak mengalami perubahan atau tetap. Hal ini dapat diartikan jika DAU mengalami peningkatan, maka mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan. Begitu sebaliknya apabila DAU mengalami penurunan maka akan mengakibatkan presentase kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan. Dengan demikian tidak terjadi hubungan timbal baik antara DAU dengan Belanja Modal.

Saran

Guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menjalankan belanja modal, ada baiknya jika pemerintah daerah lebih mengoptimalkan anggaran pada belanja modal agar dapat terealisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerahnya dan mampu untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini mengkaji

ulang dari penelitian terdahulu, maka dari penelitian ini masih dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah variabel lainnya dan juga menambah periode dan objek penelitian lebih dari yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal. *Artikel Ilmiah*. STIE Perbanas. Surabaya.
- Ardhani, P. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hairiyah., Malisan, L., dan Fakhroni, Z. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Feb Unmul*, 14(2). Samarinda.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahsun, M., F. Sulistiyowati., dan H. A. Purwanugraha. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permana, D. Y., dan Rahardjo, S. N. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) . *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 2(4). Semarang.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang Undang. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wandira, A. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, DAN DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Yovita, F. M dan Utomo, D. C. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Semarang.